

KATALOG : 9302020.3502

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO MENURUT PENGELUARAN 2017-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PONOROGO
MENURUT PENGELUARAN
2017-2021**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PONOROGO
MENURUT PENGELUARAN 2017 - 2021**

Katalog : 9302020.3502

Nomor Publikasi : 35020.2204

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 70 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Desain cover : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Diterbitkan Oleh : @Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dicetak Oleh : CV. Azka Putra Pratama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :

Ir. Siswi Harini, M.Si.

Penyunting :

Ady Prianto, SST., M.Ec.Dev

Penulis :

Muhlison Fatawi, S.ST., M.Si.

Pengolah Data :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Gambar Kulit :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

<https://id.progonid.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ponorogo, April 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Ponorogo,



Ir. Siswi Harini, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
Infografis	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT)	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori (PI)	21
2.6 Ekspor - Impor	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PONOROGO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2017-2021	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	36
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumahtangga	36
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	41
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	42
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	46
3.2.5 Perubahan Inventori	48
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	49
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB PENGELUARAN KABUPATEN PONOROGO 2017-2021	53

4.1	PDRB (Nominal)	55
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	56
4.3	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	57
BAB V	PENUTUP	59
	LAMPIRAN	63

<https://ponorogokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	28
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	29
Tabel 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	31
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	33
Tabel 5	Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	34
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	35
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	37
Tabel 8	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	39
Tabel 9	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	40
Tabel 10	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	41
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	42
Tabel 12	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	44
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Ponorogo, 2017-2021 ...	47
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	48
Tabel 15	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	51
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	55

Tabel 17	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	56
Tabel 18	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Ponorogo, 2017-2021	58

<https://ponorogokab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	28
Grafik 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	30
Grafik 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)	30
Grafik 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	32
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021	33

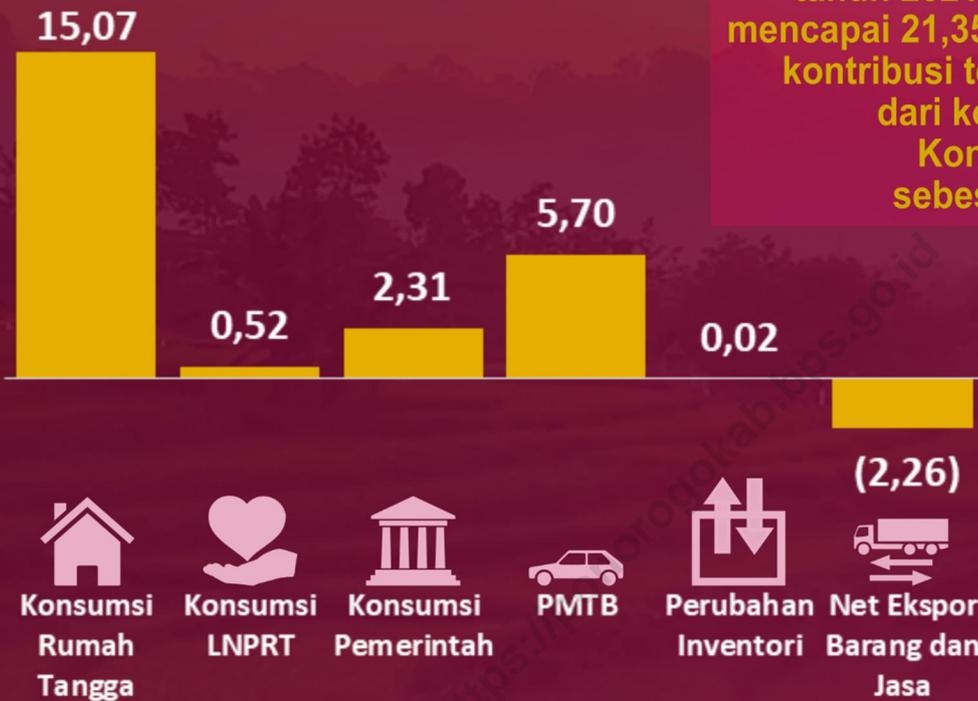
<https://ponorogokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

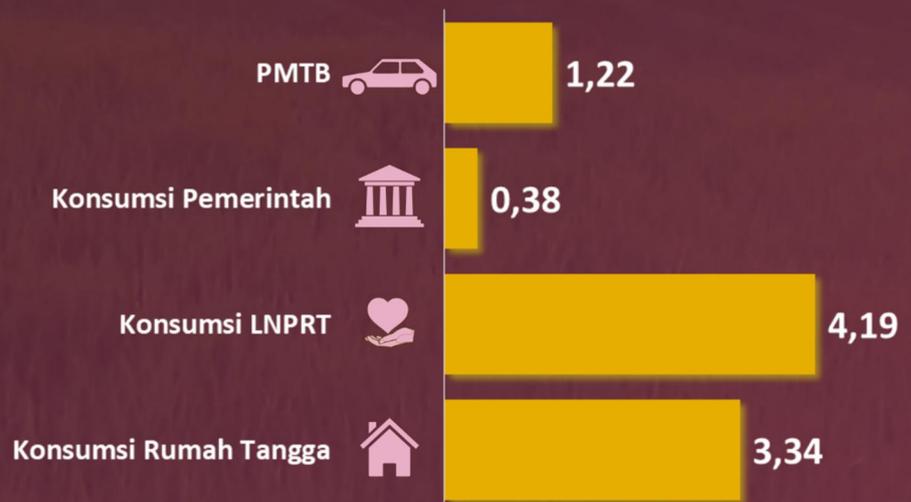
	Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 65
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 66
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 67
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 68
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 69
Tabel 6	Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 70

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 MENURUT PENGELUARAN

PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo tahun 2021 menurut pengeluaran mencapai 21,35 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar (70.58 persen) dari komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 15,07 triliun rupiah

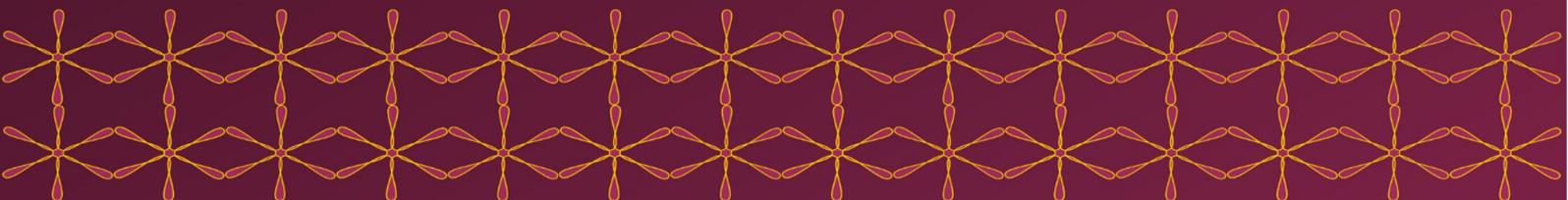


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2021 tumbuh sebesar 3,19 persen dengan komponen pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami pertumbuhan tertinggi



PENDAHULUAN

1



I.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritorial suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

³ - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIK (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

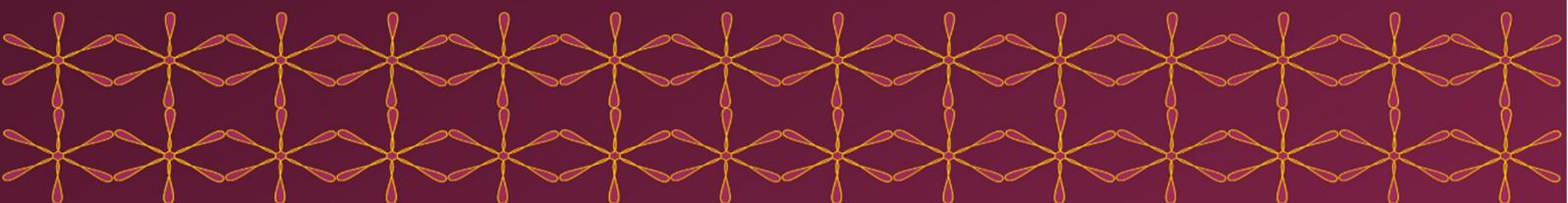
Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2



i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per kapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan BPPKAD
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan BPPKAD
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- c. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- d. Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- e. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- f. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- g. Statistik Peternakan, Dinas Pertanian.

v Metoda Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung :

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei;
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, gabah, gula Bulog; dan data ternak, Dinas Pertanian.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

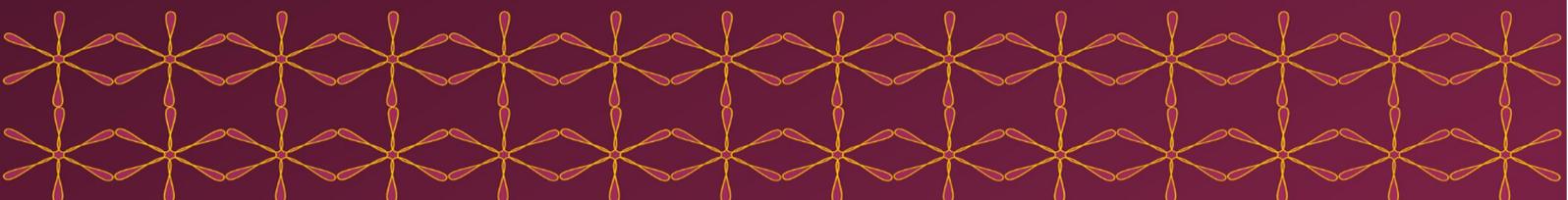
Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun seringkali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha.

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN PONOROGO
MENURUT PDRB PENGELUARAN
2017-2021**

3



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Ponorogo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kelebihan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Ponorogo akan diekspor ke daerah lain di luar Ponorogo, sedangkan jika permintaan domestik tinggi sementara produksi domestik tidak mencukupi maka akan mendatangkan (impor) barang dan jasa dari daerah lain di luar Ponorogo.

Kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo pada periode 2017 - 2019 fluktuatif namun relatif stabil di kisaran 5%, pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,90% dan tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 3,19%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada periode 2017-2021 yakni sebesar 5,10% (2017); 5,27% (2018); 5,01% (2019); -0,90% (2020) dan 3,19% (2021). Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi lima tahun terakhir terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan yang rata-rata tumbuh di kisaran 11,09%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB..

Pada periode tahun 2017 - 2021 PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni dari 17.690,42 miliar rupiah (2017) menjadi 19.174,23 miliar rupiah (2018); 20.483,75 miliar rupiah (2019); 20.513,38 miliar rupiah (2020) dan 21.350,01 miliar rupiah (2021). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Ponorogo pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.465,86	15.068,86
2. Konsumsi LNPRT	406,48	446,13	485,28	494,71	523,86
3. Konsumsi Pemerintah	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.290,72	2.305,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.567,49	5.699,63
5. Perubahan Inventori	10,79	11,76	12,04	6,30	16,32
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.262,00)	(2.499,87)	(2.814,62)	(2.311,70)	(2.264,34)
PDRB	17.690,42	19.174,23	20.483,75	20.513,38	21.350,01

Keterangan : * Angka sementara **Angka sangat sementara

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

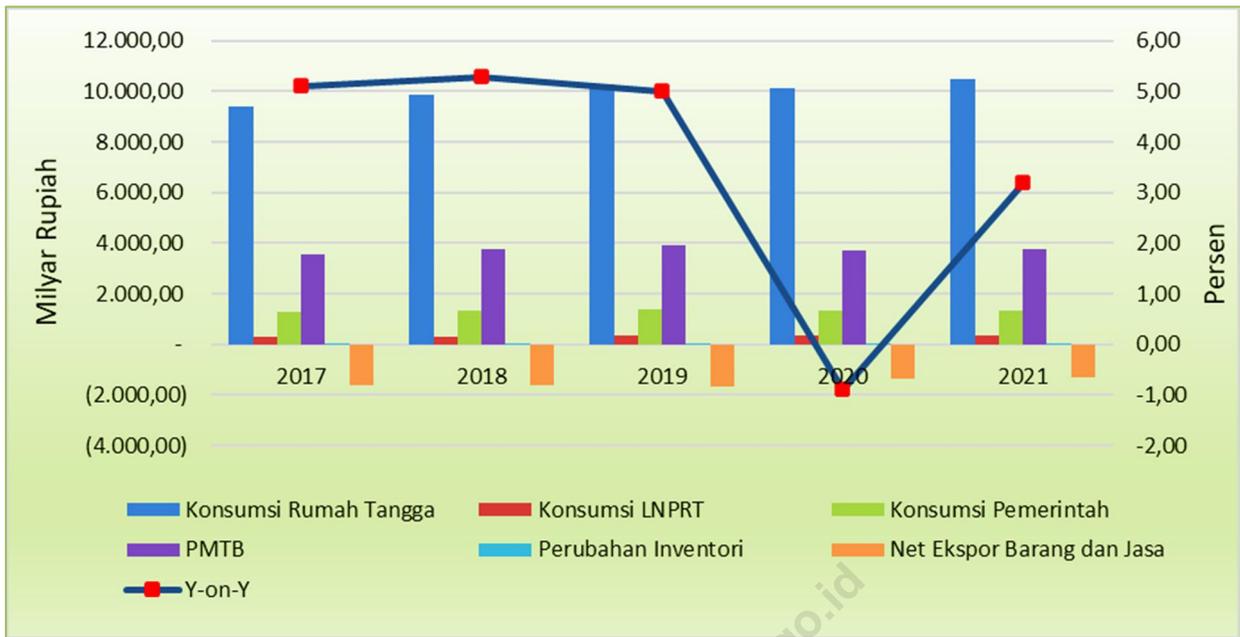
Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.419,67	9.851,69	10.304,91	10.148,16	10.486,91
2 Konsumsi LNPRT	285,38	303,62	323,62	326,11	339,77
3 Konsumsi Pemerintah	1.288,89	1.333,40	1.390,31	1.325,37	1.330,37
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.728,92	3.774,36
5 Perubahan Inventori	7,27	7,31	7,35	3,83	9,63
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.612,50)	(1.641,88)	(1.672,58)	(1.363,77)	(1.321,07)
PDRB	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62	14.619,97

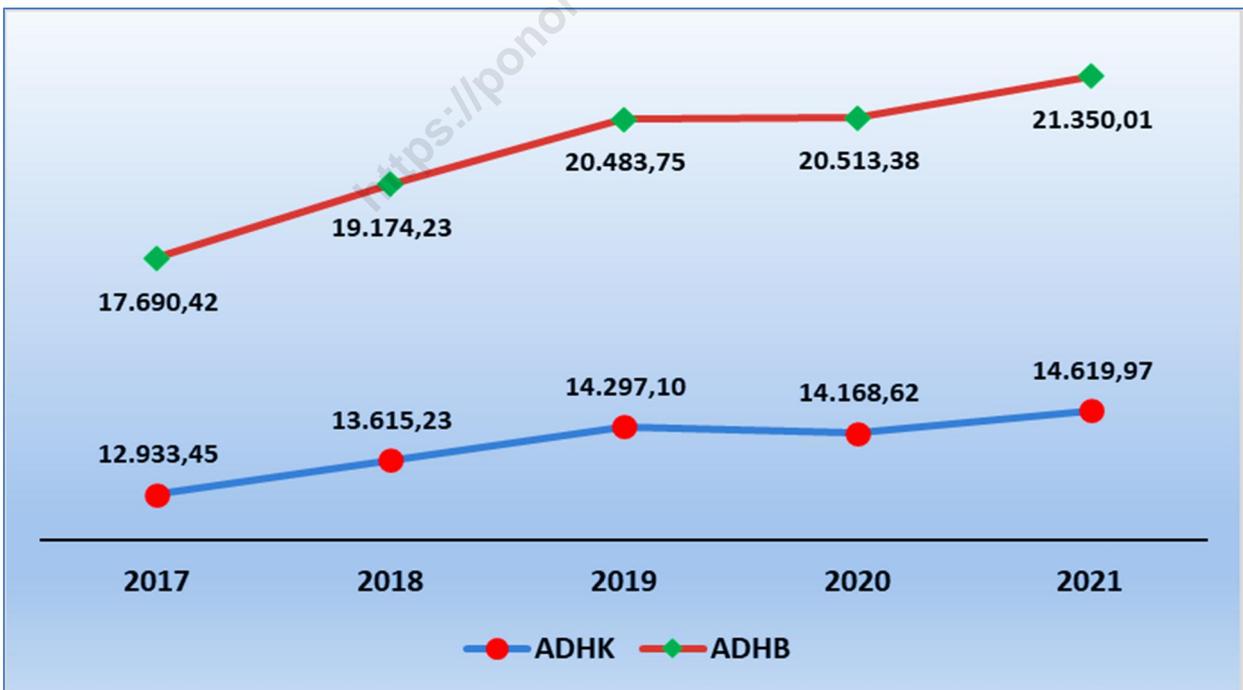
Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Ponorogo terus meningkat dari 12.933,45 miliar rupiah (2017) menjadi 13.615,23 miliar rupiah (2018); 14.297,10 miliar rupiah (2019); 14.168,62 miliar rupiah (2020) dan 14.619,97 miliar rupiah (2021). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo berfluktuasi meski masih pada kisaran 5 persen di tahun 2017-2019 yaitu 5,10 persen (2017), kemudian tumbuh cepat 5,27 persen (2018), kembali melambat menjadi 5,01 persen (2019), berkontraksi sebesar 0,90 persen di tahun 2020 karena pandemik Covid-19 kemudian tumbuh cepat sebesar 3,19 persen (2021).

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

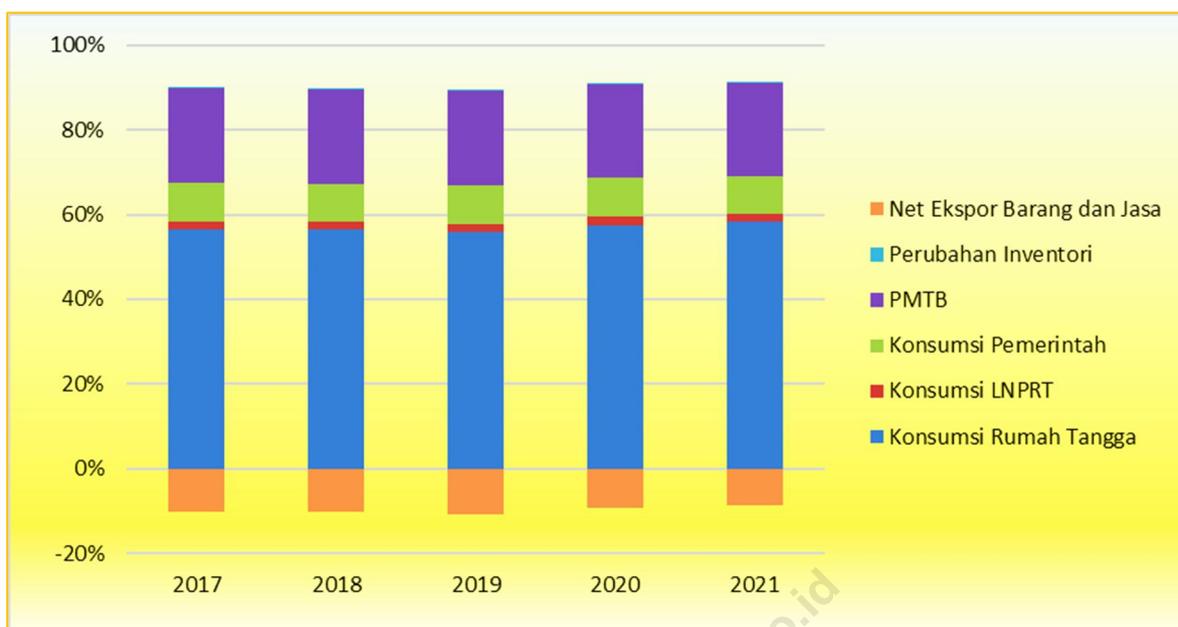
Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,05	71,05	71,34	70,52	70,58
2. Konsumsi LNPRT	2,30	2,33	2,37	2,41	2,45
3. Konsumsi Pemerintah	11,27	11,31	11,42	11,17	10,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,11	28,28	28,56	27,14	26,70
5. Perubahan Inventori	0,06	0,06	0,06	0,03	0,08
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(12,79)	(13,04)	(13,74)	(11,27)	(10,61)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2017-2021, PDRB Kabupaten Ponorogo sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 26 hingga 28 persen. Sementara komponen net ekspor barang dan jasa berkontribusi sekitar minus 10 sampai dengan minus 13 persen, yang berarti kontribusi impor masih jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada kisaran 11 persen dan cenderung berfluktuatif. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam penyerapan PDRB tidak terlalu besar. Demikian pula dengan konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) kontribusinya lebih kecil dibanding komponen konsumsi pemerintah (PK-P) yaitu sekitar 2 persen.

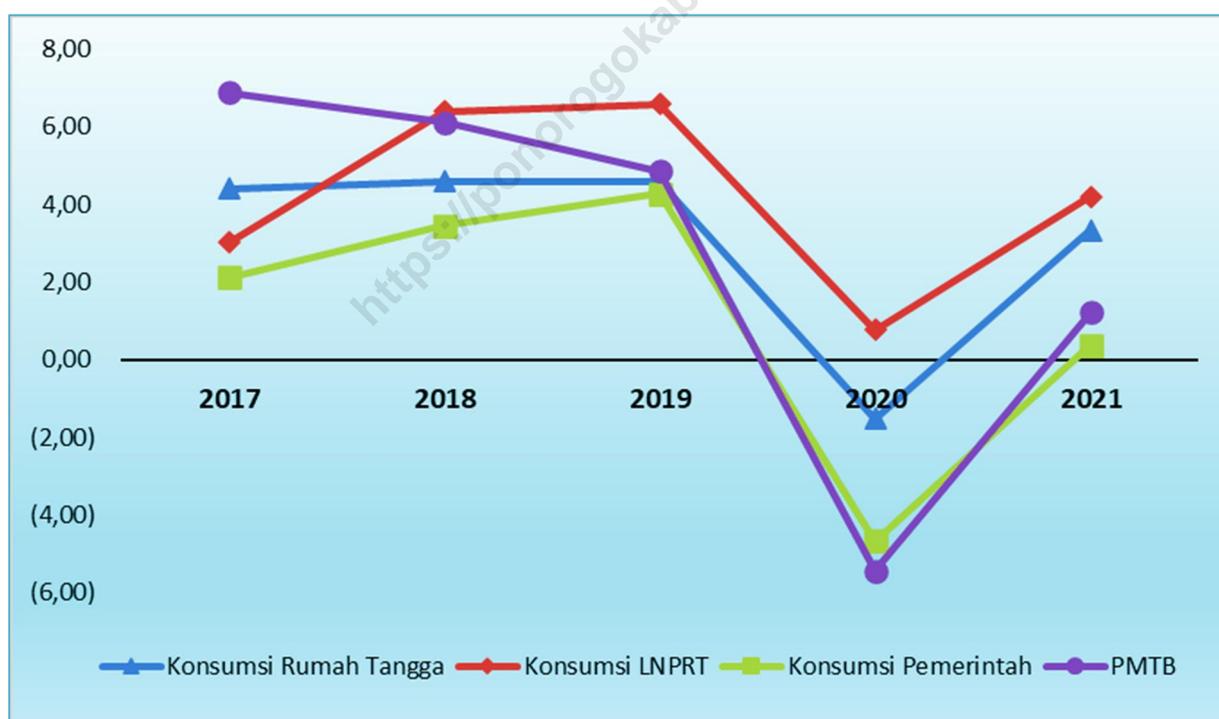
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2017 - 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami percepatan, yakni sebesar 5,10 persen (2017) dan 5,27 persen (2018). Kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2019 yakni 5,01 persen, dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,90 persen karena pandemik *Covid-19* yang menyebabkan perekonomian secara global mengalami kontraksi. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Ponorogo mulai kembali pulih dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,19 persen. Pada grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,40	4,59	4,60	(1,52)	3,34
2. Konsumsi LNPRT	3,02	6,39	6,59	0,77	4,19
3. Konsumsi Pemerintah	2,11	3,45	4,27	(4,67)	0,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,89	6,10	4,85	(5,44)	1,22
PDRB	5,10	5,27	5,01	(0,90)	3,19

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2017 - 2021, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2017 - 2021

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,04	3,63	2,54	0,52	0,80
2. Konsumsi LNPRT	3,84	3,16	2,06	1,17	1,63
3. Konsumsi Pemerintah	4,68	5,21	3,38	2,77	0,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,64	2,79	2,89	0,65	1,14
PDRB	2,51	2,96	1,73	1,05	0,87

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Selain pertumbuhan masing-masing komponen dapat dicermati pula sumber pendorong pertumbuhan terhadap total PDRB per komponen. Seperti terlihat pada tabel 6, sumber pertumbuhan terbesar PDRB Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017-2021 dipicu oleh pertumbuhan pada komponen konsumsi rumah tangga yakni 3,22 persen (2017); 3,34 persen (2018); 3,33 persen (2019); dan 2,39 persen (2021) kecuali tahun 2020 dimana sumber pertumbuhan terbesar adalah dari komponen PMTB sebesar 1,50 persen walaupun bernilai negatif. Hal ini cukup dimaklumi karena kontribusi komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yang lebih dari separuh total PDRB Kabupaten Ponorogo sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan secara total. Sedikit saja pergeseran pertumbuhan komponen ini mampu menggoyang pertumbuhan total PDRB. Sedangkan tahun 2020 dimana komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan terbesar, dapat dilihat dari perubahan nilai PDRB ADHK tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang turun paling drastic dibandingkan komponen lainnya.

⁶ Indeks perkembangan

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran
2017-2021**

					(Persen)
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,22	3,34	3,33	(1,10)	2,39
2. Konsumsi LNPR	0,07	0,14	0,15	0,02	0,10
3. Konsumsi Pemerintah	0,22	0,34	0,42	(0,45)	0,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,86	1,67	1,34	(1,50)	0,32
PDRB	5,10	5,27	5,01	-0,90	3,19

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

<https://ponorogokab.bps.go.id>

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Ponorogo untuk periode 2017 – 2021.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Ponorogo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ponorogo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman non beralkohol selain restoran; minuman beralkohol dan rokok selain restoran; pakaian; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; perabot, peralatan rumahtangga dan pemeliharaan rutin rumah; kesehatan; transportasi/angkutan; komunikasi; rekreasi dan budaya; pendidikan; restoran dan hotel; serta barang pribadi dan jasa perorangan.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017 – 2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk mendorong

terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.465,86	15.068,86
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.419,67	9.851,69	10.304,91	10.148,16	10.486,91
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71,05	71,05	71,34	70,52	70,58
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/ tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	51.080,08	55.312,62	59.128,88	54.146,60	55.902,30
b. ADHK 2010	38.278,74	39.997,10	41.697,65	37.985,18	38.904,22
Rata-rata konsumsi per-kapita/ tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	14.449,85	15.647,15	16.709,50	15.269,93	15.765,06
b. ADHK 2010	10.828,53	11.314,61	11.783,53	10.712,23	10.971,42
Pertumbuhan⁷					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	4,4	4,59	4,60	(1,52)	3,34
b. Per Rumah Tangga	4,27	4,49	4,25	(8,90)	2,42
c. Per Kapita	4,27	4,49	4,14	(9,09)	2,42
Jumlah Rumah Tangga (unit)***	246.081	246.310	247.134	267.161	269.557
Jumlah penduduk (000 orang)***	869,89	870,71	874,52	947,34	955,84

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

*** data rumah tangga/penduduk menggunakan proyeksi SP2010 (2017-2018); proyeksi SUPAS2015 (2019); proyeksi SP2020 Interim (2020-2021)

Selama periode 2017 - 2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung fluktuatif, 71,05 persen (2017); 71,05 persen (2018); namun meningkat di tahun 2019 yaitu 71,34 persen; kemudian turun lagi 70,52 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 70,58 persen.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dikarenakan pandemik Covid-19. Pada tahun 2017, setiap

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

rumah tangga di Kabupaten Ponorogo menghabiskan biaya sekitar 51,08 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 55,31 juta rupiah (2018); 59,13 juta rupiah (2019) dan menurun menjadi 54,15 juta rupiah (2020); dan sedikit meningkat menjadi 55,90 juta rupiah (2021). Perbedaan yang cukup signifikan ini dikarenakan penggunaan data rumah tangga yang sebelumnya menggunakan data proyeksi SUPAS2015 pada tahun 2019, mulai tahun 2020 menggunakan data proyeksi SP2020 yang lebih baru dan relevan.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan cenderung fluktuatif dari 4,40 persen (2017); 4,59 persen (2018); 4,60 persen (2019) dan kontraksi hingga mencapai 1,52 persen di tahun 2020, kemudian tumbuh lagi menjadi 3,34 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan konsumsi perkapita berjalan selaras dengan pertumbuhan konsumsi total atas dasar harga Konstan yaitu dari 4,27 persen di tahun 2017 menjadi 4,49 persen (2018); 4,14 persen (2019), kemudian kontraksi di tahun 2020 sebesar 9,09 persen dan kembali tumbuh sebesar 2,42 persen pada tahun 2021.

Sementara rata-rata konsumsi per rumah tangga PDRB atas dasar harga Konstan 2010 tumbuh pada kisaran 1,30 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 4,49 persen. Walaupun di tahun 2020 pertumbuhan konsumsi per rumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 8,90 persen yang disebabkan terjadinya wabah pandemik *Covid-19*, pada tahun 2021 sudah berangsur membaik dan mampu tumbuh sebesar 2,42 persen. Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 0,2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017-2021

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	30,72	30,45	30,22	31,99	32,60
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	3,15	3,08	3,04	3,14	3,14
c. Pakaian	3,18	3,17	3,10	3,08	3,12
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,83	3,76	3,71	3,96	3,92
e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,65	4,60	4,55	4,71	4,72
f. Kesehatan	4,40	4,38	4,34	4,80	4,77
g. Transportasi/Angkutan	14,55	14,93	15,32	11,52	11,09
h. Komunikasi	3,62	3,63	3,62	4,02	4,00
i. Rekreasi dan Budaya	5,86	5,79	5,77	5,15	4,96
j. Pendidikan	4,90	4,93	4,90	5,15	5,01
k. Restoran dan Hotel	15,64	15,77	15,97	16,54	16,54
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,49	5,51	5,46	5,95	6,13
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2021 didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun dari tahun ke tahun, 33,87 persen (2017); 33,53 persen (2018); 33,26 persen (2019) tetapi kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 35,13 persen dan 35,74 persen. Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan, konsumsi tertinggi ada pada subkomponen Restoran dan Hotel yang berada pada kisaran 15 sampai 16 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga makanan dan bukan makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan rumah tangga, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017 – 2021⁸

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan	3,00	3,92	3,80	3,61	4,79
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,22	4,04	3,85	3,86	5,03
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0,76	2,77	3,23	0,94	2,23
Bukan Makanan	5,13	4,92	5,01	(4,09)	2,55
c. Pakaian	4,15	3,72	3,27	(2,27)	3,37
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,13	4,02	3,78	3,70	0,90
e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,18	3,97	3,94	1,44	2,95
f. Kesehatan	4,47	4,53	3,92	7,62	1,87
g. Transportasi/Angkutan	5,91	7,05	6,93	(20,15)	4,24
h. Komunikasi	6,76	4,96	4,45	8,07	0,77
i. Rekreasi dan Budaya	4,74	4,45	4,48	(11,87)	2,40
j. Pendidikan	5,56	4,39	3,72	2,65	0,73
k. Restoran dan Hotel	4,61	4,33	5,65	0,61	1,93
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,05	3,82	3,46	5,94	4,07
Total Konsumsi	4,40	4,59	4,60	(1,52)	3,34

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan cenderung fluktuatif meskipun tingkat pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan kelompok makanan, dengan nilai masing-masing 5,13 persen (2017); 4,92 persen (2018); 5,01 persen (2019); kontraksi sebesar 4,09 persen pada tahun 2020 dan kembali tumbuh pada tahun 2021 sebesar 2,55 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tingkat perubahan harga secara implisit yang disajikan dalam tabel 10 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi rumah tangga. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 2,59 persen (2017); 3,25 persen (2018); 2,50 persen (2019); 0,91 persen (2020) dan 1,13 persen (2021). Sementara itu, laju indeks harga implisit konsumsi

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)

bukan makanan berfluktuasi dari 3,28 persen (2017) menjadi 3,83 persen (2018). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 2,56 persen (2019); 0,32 persen (2020) dan 0,62 persen pada tahun 2021.

Tabel 10. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2017-2021⁹

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan	2,59	3,25	2,50	0,91	1,13
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,49	3,27	2,49	0,91	1,07
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	3,70	3,12	2,63	1,08	1,91
Bukan Makanan	3,28	3,83	2,56	0,32	0,62
c. Pakaian	3,23	4,27	1,57	0,80	1,81
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,07	2,54	1,76	1,89	2,43
e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,68	3,15	2,14	0,96	1,41
f. Kesehatan	3,67	3,25	2,21	1,72	1,66
g. Transportasi/Angkutan	2,25	3,87	2,92	(6,78)	(3,79)
h. Komunikasi	2,34	3,34	2,60	1,53	2,92
i. Rekreasi dan Budaya	3,52	2,49	2,25	0,33	(2,03)
j. Pendidikan	5,08	4,39	2,81	1,29	0,66
k. Restoran dan Hotel	3,98	4,72	2,80	1,89	2,24
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	3,58	4,70	2,84	1,81	3,04
Total Konsumsi	3,04	3,63	2,54	0,52	0,80

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi dan secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai PDRB wilayah tersebut. Data berikut menunjukkan proporsi lembaga non profit (LNPRT) terhadap PDRB.

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Ponorogo, 2017 – 2021

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	406,48	446,13	485,28	494,71	523,86
b. ADHK (Miliar Rp)	285,38	303,62	323,62	326,11	339,77
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	2,30	2,33	2,37	2,41	2,45
Pertumbuhan (ADHK 2010)	3,02	6,39	6,59	0,77	4,19

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 406,48 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 446,13 miliar rupiah (2018); 485,28 miliar rupiah (2019); 494,71 miliar rupiah (2020) dan 523,86 miliar rupiah (2021).

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT selama kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi, berturut-turut adalah 3,02 persen (2017), 6,39 persen (2018), 6,26 persen (2019), 0,77 persen (2020) dan 4,19 persen (2021). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan berlanjut di tahun 2019 karena adanya kegiatan pemilihan anggota legislatif (Pileg) baik pusat maupun daerah serta pemilihan presiden (Pilpres) yang berimbas pada pengeluaran yang cukup besar bagi partai politik dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan bagian dari LNPRT. Meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di tahun 2019, namun persiapan yang dilakukan oleh parpol dan ormas telah dilakukan secara intensif sejak 2018 sehingga memacu pengeluaran konsumsi LNPRT di tahun 2018.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain

untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.992,98 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.169,28 miliar rupiah (2018), 2.338,22 miliar rupiah (2019), 2.290,72 miliar rupiah (2020), dan 2.305,69 miliar rupiah (2021). Sementara konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 mencapai 1.288,89 miliar rupiah (2017); 1.333,40 miliar rupiah (2018); 1.390,31 miliar rupiah (2019); 1.325,37 miliar rupiah (2020); dan 1.330,37 miliar rupiah (2021). Konsumsi atas dasar harga konstan mengindikasikan terjadinya penurunan/peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.290,72	2.305,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.288,89	1.333,40	1.390,31	1.325,37	1.330,37
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	11,27	11,31	11,42	11,17	10,80
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2.291,07	2.491,40	2.673,73	2.418,05	2.412,22
b. ADHK 2010	1.481,66	1.531,41	1.589,80	1.399,04	1.391,84
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	195.180,19	227.173,23	250.559,63	254.807,40	273.347,96
b. ADHK 2010	126.225,76	139.637,97	148.982,71	147.427,68	157.720,78
Pertumbuhan¹⁰					
a. Total konsumsi pemerintah	2,11	3,45	4,27	(4,67)	0,38
b. Konsumsi per kapita	1,98	3,36	3,81	(12,00)	(0,51)
c. Konsumsi per pegawai	5,28	10,63	6,69	(1,04)	6,98
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹¹	10.211	9.549	9.332	8.990	8.435
Jumlah penduduk (000 org) ^{***}	869,89	870,71	874,52	947,34	955,84

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

*** data penduduk menggunakan proyeksi SP2010 (2017-2018); proyeksi SUPAS2015 (2019); proyeksi SP2020 Interim (2020-2021)

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung fluktuatif, dari 11,27 persen (tahun 2017) menjadi 11,31 persen (tahun 2018). Kemudian meningkat menjadi 11,42 persen (2019) dan kemudian menurun lagi menjadi 11,17 persen di tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 10,80 persen. Meski jumlah pegawai negeri sipil semakin berkurang, namun pengeluaran belanja barang jasa serta belanja modal pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu di tahun 2019 terbit PP 11/2019 Tentang pelaksanaan UU Desa yang salah satunya mengatur tentang penyetaraan gaji perangkat

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

¹¹ Tidak termasuk polisi, militer dan pegawai pusat/provinsi

desa dengan ASN golongan II-a. Hal ini berimbas pada meningkatnya konsumsi belanja pegawai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,29 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 2,49 juta rupiah (2018); 2,67 juta rupiah (2019); dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 2,42 juta rupiah (2020) dan terus menurun mencapai 2,41 juta rupiah pada tahun 2021.

Sejalan juga dengan rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada periode 2017 hingga 2019, namun menurun pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemik *Covid-19*, dengan besaran masing-masing senilai 1,48 juta rupiah (2017); 1,53 juta rupiah (2018); 1,59 juta rupiah (2019); 1,40 juta rupiah (2020) dan 1,39 juta rupiah pada tahun 2021. Selaras dengan nilai riil pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita, laju pertumbuhannya mengalami percepatan 1,98 persen (2017); 3,36 persen (2018); dan 3,81 persen (2019) dan kembali kontraksi di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 12,00 persen dan 0,51 persen. Selain faktor berkurangnya jumlah pegawai, kebijakan efisiensi anggaran belanja barang, perjalanan dinas serta rapat dan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemik *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan kontraksi yang cukup tajam pada pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah di tahun tersebut.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah (data jumlah pegawai tidak termasuk polisi, militer dan pegawai pusat) sebesar 195,18 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 227,17 juta rupiah (2018); 250,56 juta rupiah (2019); 254,81 juta rupiah (2020) dan 273,35 juta rupiah pada tahun 2021.

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pengeluaran pemerintah menurut pegawai juga menunjukkan peningkatan dari 126,23 juta rupiah (2017) hingga mencapai 157,72 juta rupiah (2021). Pertumbuhan konsumsi pemerintah per pegawai paling cepat terjadi pada tahun 2018, yaitu 10,63 persen. Jumlah pegawai tahun 2018 berkurang cukup tajam hingga 6,48 persen dibanding tahun sebelumnya, namun pengeluaran pemerintah justru meningkat terutama untuk belanja barang/jasa. Pada periode tahun 2017 s.d 2021 jumlah pegawai pemerintah daerah (tidak termasuk polisi, militer, dan pegawai pusat/provinsi) terus berkurang dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 10.211 orang (2017); 9.549 orang (2018); 9.332 orang (2019); 8.990 orang (2020) dan 8.435 orang (2021).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan penurunan secara keseluruhan dan rata-rata per penduduk, namun meningkat secara rata-rata per pegawai pemerintah. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 4,27 persen; untuk konsumsi per-kapita 3,81 persen; dan konsumsi per-pegawai tertinggi pada tahun 2018 sebesar 10,63 persen, sedangkan tahun 2020 ketiganya mengalami kontraksi.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB dalam PDRB Pengeluaran dibagi menjadi dua sub komponen, yaitu sub komponen bangunan dan non bangunan. Jika dilihat strukturnya, proporsi PMTB bangunan terhadap total PMTB terus meningkat selama periode 2017 – 2021 yang berada pada kisaran 82 hingga 83 persen. Sebaliknya proporsi sub komponen PMTB non bangunan terhadap total PMTB cenderung menurun pada kisaran 16 persen selama periode tahun 2017 – 2019 tetapi sedikit meningkat pada periode tahun 2020-2021. Perubahan yang terjadi pada komposisi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

¹² Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Ponorogo, 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.567,49	5.699,63
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.728,92	3.774,36
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	28,11	28,28	28,56	27,14	26,70
Struktur PMTB ¹³					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	4.144,30	4.523,31	4.890,65	4.633,73	4.725,32
(%)	83,35	83,41	83,60	83,23	82,91
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	828,03	899,57	959,41	933,76	974,31
(%)	16,65	16,59	16,40	16,77	17,09
Total PMTB					
(Miliar Rp)	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.567,49	5.699,63
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁴ (%)					
a. Bangunan	7,10	6,14	4,78	(5,72)	0,82
b. Non Bangunan	5,83	5,92	5,22	(4,06)	3,13
Total PMTB	6,89	6,10	4,85	(5,44)	1,22

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Jika dilihat pertumbuhannya, masing-masing komponen PMTB pertumbuhannya fluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan mulai 2017 cenderung melambat sementara komponen non bangunan mempunyai pola yang variatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 7,10 persen, menurun menjadi 6,14 persen pada tahun 2018. Kemudian melambat lagi pada tahun 2019 dengan capaian 4,78 persen dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,724 persen. Kemudian tumbuh kembali menjadi 0,82 persen pada tahun 2021. Sedangkan sub komponen non bangunan tumbuh 5,83 persen pada tahun 2017. Namun kembali tumbuh cepat pada angka 5,92 persen di tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 melambat menjadi 5,22 persen, tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,06 persen dan pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 3,13 persen.

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2017 sampai 2020 cenderung melambat dari 6,89 persen (2017) menjadi 6,10persen (2018), dan terus melambat pada tahun berikutnya dengan angka masing-masing 4,85 persen (2019) dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 1,22 persen. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pembentukan modal dalam bentuk konstruksi (baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta) serta tumbuh pesatnya PMTB non bangunan seiring dengan berkembangnya ragam kegiatan dunia usaha.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ponorogo, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	10,79	11,76	12,04	6,30	16,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7,27	7,31	7,35	3,83	9,63
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,06	0,06	0,06	0,03	0,08

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2017 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 10,79 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 11,76 miliar rupiah (2018) dan 12,04 miliar rupiah (2019), kemudian menurun menjadi 6,30 miliar rupiah pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 16,63 miliar rupiah pada tahun 2021. Bila dilihat menurut harga konstan 2010, pada tahun 2017 perubahan inventori bernilai 7,27 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 7,31 miliar rupiah, tahun 2019 sebesar 7,35 miliar rupiah, pada tahun 2020 sebesar 3,83 miliar rupiah dan meningkat menjadi 9,63 miliar rupiah pada tahun 2021.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Ponorogo cenderung menurun bahkan stabil. Namun nilainya selalu berada pada kisaran tidak lebih dari satu persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2017, proporsi perubahan inventori adalah 0,06 persen (2017), dan masih tetap berada pada angka 0,06 persen selama tahun 2017 hingga 2019, kemudian turun menjadi 0,03 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,08 persen.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Ponorogo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Di sisi lain aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Ponorogo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara

mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Ponorogo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Ponorogo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Untuk penyajian angka di tingkat kabupaten/kota hanya ditampilkan nilai net ekspor barang dan jasa (komponen ekspor dikurangi dengan komponen impor). Hal ini disebabkan karena keterbatasan data yang tersedia sehingga dalam penghitungannya menggunakan metode tidak langsung dengan memperhatikan keseimbangan antara PDRB sisi pengeluaran dan PDRB sisi lapangan usaha.

Secara total, dalam kurun waktu 2017-2019 nilai net ekspor barang dan jasa semakin besar angka negatifnya. Artinya nilai impor barang dan jasa semakin tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor barang dan jasa. Pada tahun 2017 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar minus 2.262,00 miliar rupiah yang meningkat menjadi sebesar minus 2.499,87 miliar rupiah pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019-2021 nilai net ekspor barang dan jasa masing-masing sebesar minus 2.814,62 miliar rupiah (2019); minus 2.311,70 miliar rupiah (2020) dan minus 2.264,34 miliar rupiah (2021).

Sejalan dengan nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah perkembangan yang sama, yaitu cenderung semakin dalam angka negatifnya dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar minus 1.612,50 miliar rupiah (2017); minus 1.641,88 miliar rupiah (2018); minus 1.672,58 miliar rupiah (2019); minus 1.363,77 miliar rupiah (2020) dan 1.321,07 miliar rupiah (2021). Bila dilihat komposisinya, pada periode 2017 sampai dengan 2021, proporsi komponen net ekspor barang dan jasa dalam PDRB meningkat dari minus 12,79 persen di tahun 2017 menjadi minus 13,04 persen di tahun 2018; kemudian mulai meningkat menjadi minus 13,74 persen pada tahun 2019; menurun menjadi minus 11,27 persen di tahun 2020 dan minus 10,61 persen di tahun 2021.

**Tabel 15. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ponorogo
2017 – 2021**

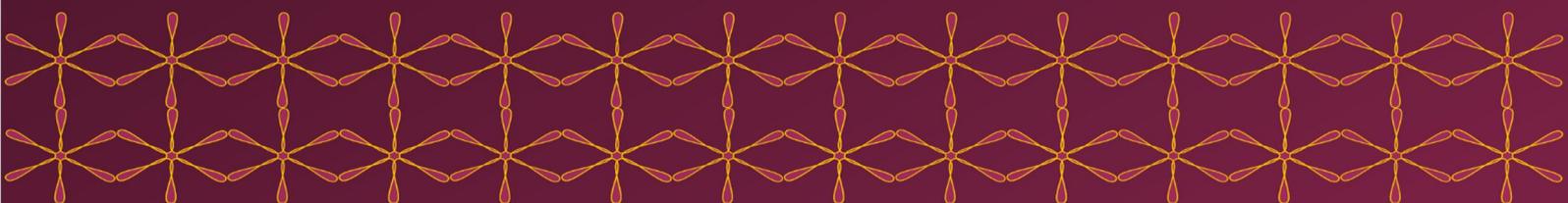
U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	(2.262,00)	(2.499,87)	(2.814,62)	(2.311,70)	(2.264,34)
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	(1.612,50)	(1.641,88)	(1.672,58)	(1.363,77)	(1.321,07)
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	(12,79)	(13,04)	(13,74)	(11,27)	(10,61)

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

<https://ponorogokab.bps.go.id>

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PONOROGO 2017-2021

4



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Ponorogo, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti penduduk dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	17.690,42	19.174,23	20.483,75	20.513,38	21.350,01
- ADHK 2010	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62	14.619,97
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	20.336,29	22.021,49	23.422,90	21.653,59	22.336,41
- ADHK 2010	14.867,85	15.637,02	16.348,55	14.956,17	15.295,43
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	4,97	5,17	4,55	(8,52)	2,27
Jumlah penduduk (000 org)***	869,89	870,71	874,52	947,34	955,84
Pertumbuhan (%)	0,12	0,09	0,44	8,33	0,90

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

*** data penduduk menggunakan proyeksi SP2010 (2017-2018); proyeksi SUPAS2015 (2019); proyeksi SP2020 Interim (2020-2021)

Tabel 16 menunjukkan peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara “riil” tahun 2017-2019 juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen, namun di tahun 2020 terkontraksi sebesar 8,52 persen, kemudian tumbuh kembali pada tahun 2021 sebesar 2,27 persen. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.465,86	15.068,86
b. LNPRT	406,48	446,13	485,28	494,71	523,86
c. Pemerintah	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.290,72	2.305,69
Jumlah	14.969,30	16.239,45	17.436,26	17.251,29	17.898,40
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	17.690,42	19.174,23	20.483,75	20.513,38	21.350,01
Proporsi (%)	84,62	84,69	85,12	84,10	83,83

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB berfluktuatif. Tahun 2017 proporsi konsumsi akhir mencapai 84,62 persen, meningkat menjadi 84,69 persen (2018). Selanjutnya tahun 2019 proporsinya meningkat kembali yaitu persen 85,12 persen. Kemudian tahun 2020 menurun menjadi 84,10 persen dan kembali menurun menjadi 83,83 persen pada tahun 2021. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 18. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Ponorogo 2017-2021

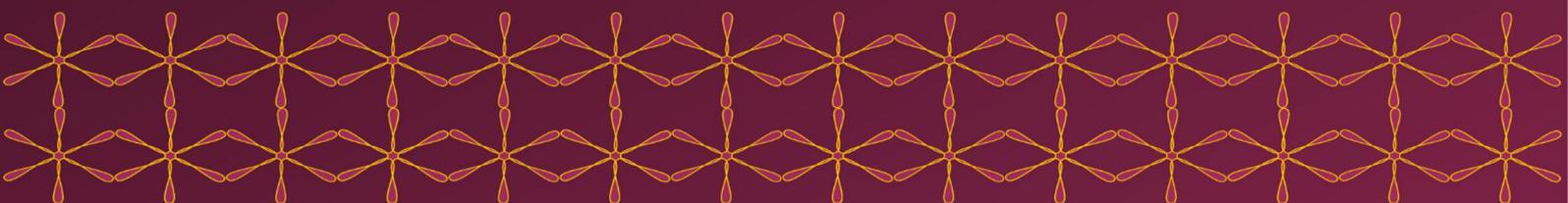
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62	14.619,97
Perubahan (Miliar rupiah)	627,80	681,78	681,87	(128,48)	451,35
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.728,92	3.774,36
ICOR	5,65	5,52	5,78	(29,02)	8,36

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data pada tabel 18 menunjukkan besaran ICOR cenderung fluktuatif pada kurun waktu 2017-2021 yaitu dari sebesar 5,65 (2017) menjadi 5,52 (2018). Sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,78, kemudian di tahun 2020 menjadi minus 29,02, dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 8,36. Salah satu penyebab mengapa terjadi penurunan output di tahun 2020 adalah ada sebagian barang modal dijual, rusak, atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, akan tetapi barang modal baru itu sementara belum berproduksi atau sudah berproduksi tetapi output yang dihasilkan belum sesuai dengan besarnya kapasitas produksi yang sebenarnya, sehingga selisih output antara tahun pada saat ditanamkan investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Hal ini dikarenakan adanya pandemik *Covid-19* yang terjadi selama tahun 2020. Pada tahun 2021, besaran ICOR mencapai 8,36, yang artinya untuk meningkatkan PDRB sebesar 1 persen membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 8,36 persen. Nilai ICOR yang semakin kecil mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi. Sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi.

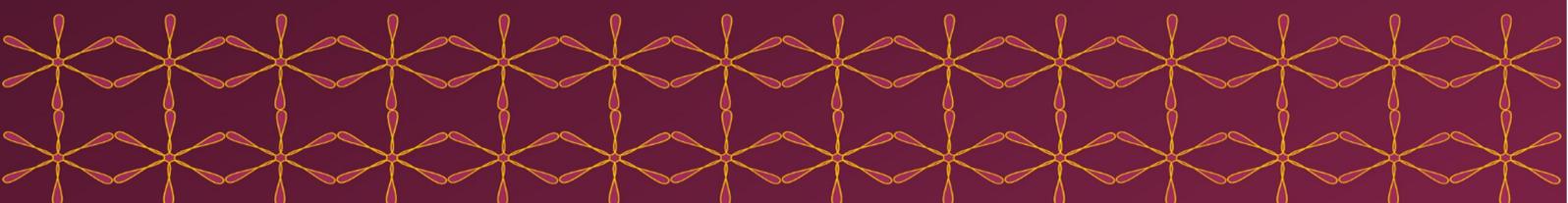
PENUTUP

5



1. PDRB menurut pengeluaran tiap tahunnya dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017 sampai dengan 2021, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Ponorogo terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

(Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.465,86	15.068,86
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3.861,76	4.148,83	4.415,71	4.628,10	4.912,89
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	395,99	419,67	444,60	453,60	472,57
1.c. Pakaian	399,19	431,74	452,81	446,10	469,51
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	480,81	512,84	541,56	572,23	591,40
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	584,35	626,74	665,41	681,48	711,49
1.f. Kesehatan	553,39	597,30	634,47	694,58	719,27
1.g. Transportasi/Angkutan	1.829,08	2.033,92	2.238,24	1.666,09	1.670,90
1.h. Komunikasi	455,40	493,97	529,40	580,89	602,40
1.i. Rekreasi dan Budaya	736,78	788,74	842,58	745,03	747,40
1.j. Pendidikan	616,30	671,58	716,14	744,58	754,95
1.k. Restoran dan Hotel	1.966,50	2.148,41	2.333,49	2.392,07	2.492,72
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	690,28	750,33	798,34	861,10	923,35
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	406,48	446,13	485,28	494,71	523,86
3. Konsumsi Pemerintah	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.290,72	2.305,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.567,49	5.699,63
4.a. Bangunan	4.144,30	4.523,31	4.890,65	4.633,73	4.725,32
4.b. Non-Bangunan	828,03	899,57	959,41	933,76	974,31
5. Perubahan Inventori	10,79	11,76	12,04	6,30	16,32
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.262,00)	(2.499,87)	(2.814,62)	(2.311,70)	(2.264,34)
PDRB (1+2+3+4+5+6)	17.690,42	19.174,23	20.483,75	20.513,38	21.350,01

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021**

(Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.419,67	9.851,69	10.304,91	10.148,16	10.486,91
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2.905,34	3.022,58	3.138,96	3.260,24	3.424,25
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	279,98	287,74	297,02	299,81	306,50
1.c. Pakaian	308,41	319,88	330,33	322,83	333,73
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	400,16	416,23	431,95	447,93	451,97
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	463,68	482,11	501,11	508,34	523,36
1.f. Kesehatan	390,82	408,54	424,57	456,92	465,44
1.g. Transportasi/Angkutan	1.488,30	1.593,23	1.703,59	1.360,31	1.418,02
1.h. Komunikasi	378,40	397,18	414,86	448,34	451,77
1.i. Rekreasi dan Budaya	561,88	586,86	613,13	540,37	553,35
1.j. Pendidikan	409,02	426,98	442,87	454,59	457,90
1.k. Restoran dan Hotel	1.314,69	1.371,56	1.449,08	1.457,90	1.486,02
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	519,00	538,80	557,44	590,58	614,60
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	285,38	303,62	323,62	326,11	339,77
3. Konsumsi Pemerintah	1.288,89	1.333,40	1.390,31	1.325,37	1.330,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.728,92	3.774,36
4.a. Bangunan	2.943,48	3.124,27	3.273,45	3.086,11	3.111,45
4.b. Non-Bangunan	601,26	636,83	670,05	642,81	662,91
5. Perubahan Inventori	7,27	7,31	7,35	3,83	9,63
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.612,50)	(1.641,88)	(1.672,58)	(1.363,77)	(1.321,07)
PDRB (1+2+3+4+5+6)	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62	14.619,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,05	71,05	71,34	70,52	70,58
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	21,83	21,64	21,56	22,56	23,01
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,24	2,19	2,17	2,21	2,21
1.c. Pakaian	2,26	2,25	2,21	2,17	2,20
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	2,72	2,67	2,64	2,79	2,77
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	3,30	3,27	3,25	3,32	3,33
1.f. Kesehatan	3,13	3,12	3,10	3,39	3,37
1.g. Transportasi/Angkutan	10,34	10,61	10,93	8,12	7,83
1.h. Komunikasi	2,57	2,58	2,58	2,83	2,82
1.i. Rekreasi dan Budaya	4,16	4,11	4,11	3,63	3,50
1.j. Pendidikan	3,48	3,50	3,50	3,63	3,54
1.k. Restoran dan Hotel	11,12	11,20	11,39	11,66	11,68
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	3,90	3,91	3,90	4,20	4,32
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	2,30	2,33	2,37	2,41	2,45
3. Konsumsi Pemerintah	11,27	11,31	11,42	11,17	10,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	28,11	28,28	28,56	27,14	26,70
4.a. Bangunan	23,43	23,59	23,88	22,59	22,13
4.b. Non-Bangunan	4,68	4,69	4,68	4,55	4,56
5. Perubahan Inventori	0,06	0,06	0,06	0,03	0,08
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(12,79)	(13,04)	(13,74)	(11,27)	(10,61)
PDRB (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,40	4,59	4,60	-1,52	3,34
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,22	4,04	3,85	3,86	5,03
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0,76	2,77	3,23	0,94	2,23
1.c. Pakaian	4,15	3,72	3,27	-2,27	3,37
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,13	4,02	3,78	3,70	0,90
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,18	3,97	3,94	1,44	2,95
1.f. Kesehatan	4,47	4,53	3,92	7,62	1,87
1.g. Transportasi/Angkutan	5,91	7,05	6,93	-20,15	4,24
1.h. Komunikasi	6,76	4,96	4,45	8,07	0,77
1.i. Rekreasi dan Budaya	4,74	4,45	4,48	-11,87	2,40
1.j. Pendidikan	5,56	4,39	3,72	2,65	0,73
1.k. Restoran dan Hotel	4,61	4,33	5,65	0,61	1,93
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,05	3,82	3,46	5,94	4,07
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	3,02	6,39	6,59	0,77	4,19
3. Konsumsi Pemerintah	2,11	3,45	4,27	-4,67	0,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6,89	6,10	4,85	-5,44	1,22
4.a. Bangunan	7,10	6,14	4,78	-5,72	0,82
4.b. Non-Bangunan	5,83	5,92	5,22	-4,06	3,13
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB (1+2+3+4+5+6)	5,10	5,27	5,01	-0,90	3,19

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	133,44	138,29	141,80	142,55	143,69
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	132,92	137,26	140,67	141,96	143,47
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	141,44	145,85	149,68	151,30	154,18
1.c. Pakaian	129,44	134,97	137,08	138,18	140,69
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	120,15	123,21	125,38	127,75	130,85
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	126,02	130,00	132,79	134,06	135,95
1.f. Kesehatan	141,60	146,20	149,44	152,01	154,54
1.g. Transportasi/Angkutan	122,90	127,66	131,38	122,48	117,83
1.h. Komunikasi	120,35	124,37	127,61	129,56	133,34
1.i. Rekreasi dan Budaya	131,13	134,40	137,42	137,87	135,07
1.j. Pendidikan	150,68	157,29	161,71	163,79	164,87
1.k. Restoran dan Hotel	149,58	156,64	161,03	164,08	167,74
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	133,00	139,26	143,21	145,81	150,24
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	142,43	146,93	149,95	151,70	154,18
3. Konsumsi Pemerintah	154,63	162,69	168,18	172,84	173,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	140,27	144,18	148,35	149,31	151,01
4.a. Bangunan	140,80	144,78	149,40	150,15	151,87
4.b. Non-Bangunan	137,72	141,26	143,19	145,26	146,97
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB (1+2+3+4+5+6)	136,78	140,83	143,27	144,78	146,03

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,04	3,63	2,54	0,52	0,80
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,49	3,27	2,49	0,91	1,07
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	3,70	3,12	2,63	1,08	1,91
1.c. Pakaian	3,23	4,27	1,57	0,80	1,81
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,07	2,54	1,76	1,89	2,43
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,68	3,15	2,14	0,96	1,41
1.f. Kesehatan	3,67	3,25	2,21	1,72	1,66
1.g. Transportasi/Angkutan	2,25	3,87	2,92	-6,78	-3,79
1.h. Komunikasi	2,34	3,34	2,60	1,53	2,92
1.i. Rekreasi dan Budaya	3,52	2,49	2,25	0,33	-2,03
1.j. Pendidikan	5,08	4,39	2,81	1,29	0,66
1.k. Restoran dan Hotel	3,98	4,72	2,80	1,89	2,24
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	3,58	4,70	2,84	1,81	3,04
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	3,84	3,16	2,06	1,17	1,63
3. Konsumsi Pemerintah	4,68	5,21	3,38	2,77	0,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3,64	2,79	2,89	0,65	1,14
4.a. Bangunan	3,59	2,83	3,19	0,50	1,15
4.b. Non-Bangunan	3,91	2,57	1,36	1,45	1,18
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB (1+2+3+4+5+6)	2,51	2,96	1,73	1,05	0,87

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

Jl. Letjend R. Suprpto No. 14 Ponorogo
Telp/Fax : 0352-481026 Email : bps3502@bps.go.id
Homepage : <https://ponorogokab.bps.go.id>